

PEMIKIRAN AGAMA DAN NEGARA MOHAMMAD NATSIR

¹Retanisa Rizqi, ²Riski Aulia Ahmad

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Retanisarizqi222@gmail.com, rizkyauliaa111@gmail.com

Abstract: *Mohammad Natsir is an intellectual figure who is well-known as one of the figures who voiced that Islam can be used as the basis of the state. Mohammad Natsir tried to unite Islam and the State in Indonesia. The purpose of this study is to examine the thoughts of Mohammad Natsir about the relationship between Islam and the state, using the library search method. The relationship between Islam and the State in Mohammad Natsir's view is an integrated relationship between politics, economics and a way of life that does not recognize the separation between religion and politics. Mohammad Natsir said that the state is not the ultimate goal of Islam but it is to become a tool in implementing Islamic rules contained in the Qur'an and Sunnah.*

Keywords : *Islam, Relations, Religion, and the State.*

Abstrak: *Mohammad Natsir merupakan seorang tokoh Intelektual yang terkenal sebagai salah satu tokoh yang menyuarakan bahwa Islam bisa dijadikan sebuah dasar negara. Mohammad Natsir berusaha untuk menyatukan Islam dan Negara di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah pemikiran Mohammad Natsir tentang relasi antara agama Islam dan Negara, dengan menggunakan metode library search. Hubungan Islam dan Negara dalam pandangan Mohammad Natsir adalah hubungan yang saling berintegrasi antara politik, ekonomi dan pandangan hidup yang tidak mengenal pemisahan antara Agama dan politik. Mohammad Natsir mengatakan bahwa negara bukanlah tujuan akhir Islam tetapi hal tersebut untuk menjadi sebuah alat dalam mengimplementasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam Al-quran dan Sunah.*

Kata Kunci : *Islam, Relasi, Agama, dan Negara.*

A. Pendahuluan

Diskusi panjang tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia muncul seiring dengan timbulnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu pada awal abad ke-20. Pada masa perjuangan kemerdekaan tersebut, sejumlah intelektual muslim, tak terkecuali Mohammad Natsir (1908-1993), dari berbagai organisasi

sosial keagamaan dan politik seperti Sarekat Islam, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Persatuan Islam (Persis), dan lain-lain telah mulai melontarkan pemikiran-pemikiran politiknya berkenaan dengan hubungan antara Islam dan kebangsaan.¹

Mohammad Natsir menawarkan Islam sebagai sebuah negara. Hal ini bisa disimak dalam pidatonya di pleno konstituante pada 12 November 1957, dimana Natsir menghendaki negara Indonesia berasaskan ideologi Islam: “Negara Demokrasi Berdasarkan Islam”.² Keinginannya ini bukan semata-mata karena Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia, melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dan menjamin kerukunan beragama dan bernegara.³

Mohammad Natsir adalah seorang tokoh yang perjuangannya sering menjadi sasaran pandangan yang berbeda-beda, terutama apabila dikaitkan dengan cita-cita beliau tentang negara Islam atau cita-cita membentuk negara Indonesia yang berdasarkan Islam. Bertitik tolak dari permasalahan negara Islam atau negara Indonesia yang berdasarkan Islam, faktanya Islam memang senantiasa mendasari cita-cita perjuangan Natsir.

Berangkat dari latar belakang ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam lagi bagaimana sebenarnya pemikiran Mohammad Natsir tentang agama dan negara.

B. Pembahasan

1. Riwayat Keluarga dan Pendidikan Natsir

Mohammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Berukir, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,

¹ khumaidi, “ISLAM DAN TATANEGARA: PEMIKIRAN SOSIAL POLITIK MUHAMMAD NATSIR,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 20, no. No. 1 (Juni 2005): hlm. 114.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 194.

³ Munawir Sjadzali, hlm. 203.

Sumatera Barat. Lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Khadijah, dan ayahnya yang bernama Idris Sutan Saripado.⁴

Seperti halnya kehidupan sehari-hari masyarakat Minang, Natsir kecil di malam hari tidur di Surau dengan kawan-kawan sebayanya. Anak-anak yang berumur sekitar delapan tahun akan menjadi bahan ejekan kalau ia masih tidur di rumah. Kebiasaan yang demikian sudah merupakan hal yang membudaya di daerah Minang.⁵

Basis spiritual yang relatif kokoh dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat Minang, merupakan modal yang sangat berharga bagi Natsir. Ranah Minang memang terkenal dengan keteguhan masyarakatnya sebagai pemeluk agama Islam yang taat. Lingkungan religius tersebut sangat mempengaruhi pandangan Natsir, ia menghayati ajaran Islam yang tertanam sejak kecil dan merupakan bekal hidup sehingga menjadikannya sebagai sosok yang teguh dan tegas dalam pendirian.⁶

Selain pendidikan agama yang ditanamkan pada diri Natsir, terdapat pula keinginan orangtua Natsir untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Namun hal itu terbentur biaya karena kondisi keuangan orangtuanya yang tidak dapat membiayai pendidikan Natsir. Maka ketika familinya meminta Natsir untuk ikut bersamanya ke Padang tampak secercah harapan baginya untuk mengecap dunia pendidikan normal. Di Padang Natsir masuk HIS Adabiyah (Hollandsch-Inlandsche School Adabiyah). Hanya kurang dari satu tahun Natsir bersekolah di HIS Adabiyah Padang sampai ayahnya menjemput Natsir untuk bersekolah di HIS Pemerintah di Solok.⁷

Selain bersekolah pagi di HIS, pada sore harinya Natsir juga mengikuti pelajaran pada sebuah Madrasah Diniyah yang dipimpn oleh Tuanku Mudo Amin, seorang pengikut Haji Rasul. Haji Rasul merupakan seorang tokoh

⁴ Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan dan Perjuangan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 1.

⁵ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 15.

⁶ Ahmad Suhelmi, hlm. 16.

⁷ Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan dan Perjuangan*, hlm. 5.

pembaharu di Minangkabau. Lalu pada malam harinya mengaji sambil belajar Bahasa Arab.⁸

Dari HIS Solok, Natsir kemudian pindah ke HIS Pemerintah di Padang. Di kota Padang, selain belajar formal ia tetap aktif mengakui berbagai pelajaran-pelajaran keislaman. Di HIS Padang, Natsir belajar kurang lebih selama tiga tahun hingga tamat pada 1923.⁹

Setelah tamat dari HIS Padang, Natsir melanjutkan pendidikan di MULO Padang (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs Padang). Di MULO Padang inilah Natsir mulai berkenalan dengan organisasi-organisasi pelajar dari kepemudaan. Pertama ia masuk organisasi Jong Sumatranen Bond yang di ketuai oleh Sanusi Pane. Kemudian ia masuk organisasi Jong Islamieten Bond, serta aktif di Kepanduan Natipij.

Setelah ia menyelesaikan pendidikannya di MULO pada tahun 1927, Natsir berangkat ke Bandung untuk menuntut ilmu di AMS. Ketika di AMS tersebut Natsir bergabung dengan kelompok Islam modernis. Persatuan Islam (Persis) dan mengikuti pertemuan dan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tokoh Ahmad Hassan berpengaruh organisasi tersebut. Satu tahun setelah bergabung di Persis, yakni 1929 Natsir menjadi anggota Jong Islamieten Bond yang didirikan oleh Agus Salim.

Hubungan Natsir dan Hassan berawal ketika Natsir bersekolah di Bandung-pusat Persis. Hal ini memberikan peluang baginya untuk belajar dibawah bimbingan Hassan. Selama waktu itu, Natsir beserta teman-temannya seperti Fakhruddin al-Kahiri, Abdurrahman, Qamaruddin, dan Isa Anshary, mengunjungi rumah Hassan setiap malam untuk mempelajari berbagai aspek agama Islam. Menurut Natsir ada dua alasan mengapa dia dan teman-temannya menganggumi sosok Hassan, *pertama* pengetahuan Hassan dalam berbagai aspek ajaran Islam sangat luas. *Kedua*, cara Hassan dalam mengenalkan nilai-nilai Islam kepada murid-muridnya sangat menarik kaum muda Islam.¹⁰

⁸ George McT Kahin, *In Memoriam: Mohammad Natsir 1907-1993* (Indonesia, 1993), hlm. 159.

⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 37.

¹⁰ Akh Minhaji, A. *HASSAN Sang Ideologi Reformasi Di Indonesia 1887 - 1958* (Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hlm. 321.

Pengaruh Hassan lainnya terhadap Natsir tampak pada pemahaman Natsir tentang “pembaharuan/reformasi”. Bagi Natsir, esensi pembaharuan adalah mengintroduksi kembali apa yang telah diperkenalkan pada awal sejarah Islam dan telah ditinggalkan oleh umat Islam. Tujuan gerakan pembaharuan ini adalah untuk membebaskan Islam dari Noda. Natsir berkeyakinan bahwa umat Islam mengalami kesalahpahaman tentang maksud dan tujuan yang sebenarnya dari ajaran Islam, sehingga Natsir sangat menentang *taqlid*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Natsir juga mendorong generasi muda untuk berjuang meraih kembali kemenangan Islam. Perjuangan tersebut merupakan misi yang dilakukan oleh gurunya, Hassan.¹¹

Di Kota Bandung pula, Natsir menyaksikan semua itu sebagai bahan renungan dan pemikirannya. Karena ditengah hiruk pikuknya kota tersebut, Natsir melihat ketimpangan-ketimpangan bangsanya sebagai warga jajahan. Bentuk-bentuk ketidakadilan dan kesenjangan antara penduduk kulit putih serta priyai-priyai yang pernah ia perhatikan tatkala di Padang dahulu, di Bandung terasa lebih mecolok. Sebuah kenyataan bahwa sebagian besar rakyat yang terbelakang tersebut adalah kaum muslimin, yang dalam keyakinannya adalah saudara. Ia melihat realitas masyarakat yang terbelakang itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah melihat realitas tersebut, maka Natsir memilih metode untuk menciptakan kesadaran baru terhadap masyarakat yaitu dengan pendidikan. Natsir terobsesi pada dunia pendidikan yang sarat dengan ilmu-ilmu keIslaman yang dipadukan dengan ilmu-ilmu modern. Oleh karna itu Natsir merealisasikan niatnya dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan berkoordinasi bersama Persis.

2. Pemikiran hubungan Agama dan Negara Mohammad Natsir

Sebagai seorang ideolog Muslim, Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. Sebagai suatu ideologi, Islam dalam pandangan Natsir mempunyai dua cakupan kehidupan yaitu:¹²

¹¹ Akh Minhaji, hlm. 322.

¹² Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, hlm. 90.

“...hidup duniawi dan hidup ukhrawi itu pada hakikatnya, hanyalah dua fase (tahapan) dari kehidupan yang satu dan kontinu; fase yang satu bersambungan dengan yang lain, sebagaimana bersambungunya malam dengan siang, dan siang dengan malam, menurut hukum peredaran angkasa dalam sistem tertentu.”

Dalam hal ini Natsir mengikuti prinsip Al-quran¹³ dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya “Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Dalam firman Allah ini adalah manusia itu tidak lebih hanya merupakan seorang hamba Allah yang harus mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Prinsip penghambaan diri kepada Allah yang hambaan diri kepada Allah yang tampaknya menjadi dasar ideologi seorang Natsir dalam memopong persoalan-persoalan kehidupan.

Ibadah tidak terbatas pada bentuk-bentuk ritual terkait dengan hubungan manusia (*'abd*) dan Tuhannya (*ma'būd*), melainkan meliputi fungsi tugas manusia sebagai anggota masyarakat (*khâbl mîn an-nâs*) dan fungsi dan tugasnya terhadap alam semesta (*khâbl mîn jâmi al-alâm*).

Berdasarkan pemikiran ideologinya tersebut maka Natsir menolak segala bentuk pemikiran sekuler yang menyebabkan pemikiran tersebut mengabaikan nilai-nilai Islam. Menurut beliau, paham sekularisme ini merupakan bahaya bagi umat Islam. Karena dalam kehidupan sekularis tidak terdapat tujuan-tujuan apapun yang berada dalam batas luar dunia seperti akherat, Tuhan, dan lain-lain. Paham kaum sekularis juga memandang konsep-konsep Tuhan dan agama merupakan hasil ciptaan manusia.

Dalam pembentukan sistem politik atau negara, menurut Natsir harus melakukan sebuah ijtihad untuk menemukan sitem yang ideal dan tepat sesuai dengan kondisi zaman. Bahkan dalam melakukan ijtihad, Islam tidak menutup kemungkinan adanya adopsi konsep dan sistem negara atau politik diluar dari Islam. Tapi penerimaan sistem tersebut harus tetap dalam kontrol bingkai Al-

¹³ *Ibid.*, hlm. 91

quran dan Sunnah yang menjadikan kedua hal itu sebagai alat ukur dan penentu kriteria diterima atau tidaknya suatu sistem dalam Islam.¹⁴

Dengan ukuran dan kriteria yang ditetapkan oleh Al-quran dan Sunnah, Natsir melihat bahwa Islam sesuai dengan konsep demokrasi. Menurutnya “Islam itu anti Istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang”.¹⁵

Natsir pernah mengemukakan bahwa sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab kemungkinan Islam berhasil dalam suatu sistem yang demokratis. Melalui sistem demokrasi mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.¹⁶ Islam demokrasi juga memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, meluruskan pemerintahan yang zalim. Bahkan kalau perlu memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan ke zaliman tersebut dengan kekuatan fisik.¹⁷

Kiprah Natsir di dunia politik pun tak lepas dari dari partai Masyumi yang dibentuk pada tanggal 7-8 November 1945 melalui sebuah Kongres Umat Islam di Yogyakarta. Menurut Natsir pembentukan Masyumi adalah dalam rangka menyalurkan aspirasi politik umat. Terbentuk nya partai politik Islam ini dipercaya untuk mewakili umat Islam Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan tekadnya dengan melahirkan program-program yaitu menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan Indonesia.¹⁸ Dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, kedaulatan rakyat, dan hak-hak asasi manusia, dapat dikatakan bahwa Masyumi sejak awal berdirinya adalah partai yang membela demokrasi. Natsir meyakini bahwa tentang prinsip-prinsip Islam tentang *Syura* lebih dekat kepada urusan-urusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan.¹⁹ Sistem

¹⁴ M. Natsir, *Capita Selecta*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 450.

¹⁵ M. Natsir, hlm. 452.

¹⁶ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, hlm. 103.

¹⁷ M. Natsir, *Capita Selecta*, hlm. 439.

¹⁸ Waluyo, *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 68.

¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, *M. Natsir dan Sayyid al-Maudūdi: Telaah tentang dinamika Islam dan Transformasi ke dalam Ideologi Sosial dan Politik* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67.

kenegaraan ini ia sebut dengan *theistic democracy*²⁰. Suatu negara demokrasi dengan tetap menjadikan agama Islam sebagai dasar konstitusi negara.

Dasar pemeritahan negara, menurut Natsir adalah Islam. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah dengan artian agar mendapat kejayaan dunia dan akherat kelak.²¹

Natsir cenderung setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Natsir, Pancasila dianut sebagai dasar rohani, akhlak, dan susila oleh bangsa Indonesia. Natsir memberikan tafsiran tentang Pancasila:

*Pancasila adalah pernyataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus kita laksanakan, terlaksananya didalam negara dan bangsa kita. Maka, apabila ditinjau dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menegaskan kepada segala warga negara dan penduduk negara, dan dunia luar, bahwa sesungguhnya seorang manusia tidak akan dapat memulai kehidupan menuju kebajikan dan keutamaan, kalau ia belum dapat menyadarkan dan mempersembahkan dirinya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, bagaimana Al-Quran akan bertentangan dengan sila pertama itu? Dalam pengakuan Al-Quran, Pancasila itu akan hidup subur. Satu dengan yang lain tidak apriori bertentangan tapi tidak pula identik (sama)*²².

Natsir melihat bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam. Selanjutnya untuk memahami pemikiran Natsir tentang agama dengan negara kita perlu memahami dua hal berikut:

- 1) Faktor situasi politik pada saat terjadinya polemik pada tahun 1940an yang memunculkan polemik dan pertarungan ideologi antara kaum nasionalis Islam dengan kalangan netral agama.
- 2) Faktor emosional Natsir selaku tokoh negarawan muslim, yang melahirkan gagasan-gagasan definitif tentang pemikiran Soekarno yang cenderung ke arah sekuler.²³

²⁰ M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 219.

²¹ M. Natsir, *Capita Selecta*, hlm. 436.

²² H. Mas'oeed Abidin, *Gagasan Dan Gerakan Dakwah Natsir* (Yogyakarta: Gree Publishing, 2012), hlm. 385.

²³ Deliar Noer, *Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942*, hlm. 315.

Seperti yang sudah dibahas di pembahasan atas, bahwa Natsir ini menolak paham sekuler karna paham tersebut mengabaikan nilai-nilai Islam, membahayakan bagi umat Islam, dan Paham kaum sekularis juga memandang konsep-konsep Tuhan dan agama merupakan hasil ciptaan manusia.

Natsir tidak suka dengan pemikiran Soekarno karena Soekarno berkiblat pada pembaharuan Islam di Turki, Soekarno menganalisis sebab-sebab pemisah agama dari negara. substansi uraian Soekarno dalah keberpihakannya pada gagasan sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal Attaturk. Dasar argumen Soekarno adalah bahwa agama merupakan persoalan akherat yang hanya bersangkutan anantara individu dengan Tuhannya. Sedangkan persoalan negara adalah murni persoalan duniawi dan kemasyarakatan.²⁴

Menurut Soekarno dalam sejarah Islam tidak pernah ada yang dinamakan negara Islam. Nabi Muhammad dalam pandangannya adalah bukan seorang negarawan tetapi hanya seorang pemimpin spiritual. Soekarno dalam hal ini mengutip tulisan Abdul Raziq buku tersebut berisi bahwa agama dan kekuatan politik adalah dua dimensi kehidupan yang berbeda. Menurut Raziq pula khalifah bukan pemimpin umat dalam masalah agama dan dunia. Persatuan agama dan politik dalam Islam tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dianggap sebagai kekeliruan dalam memahami hakikat misi nabi. Raziq juga mengungkapkan bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah agama sehingga Islam memberikan aturan moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan.

Berdasarkan pemikiran Raziq itulah Soekarno menuntut agar ada pemisahan yang tegas antara agama dan kekuasaan politik. Dalam pandangan Soekarno sendiri, penyatuan agama dan negara akan membangkitkan *caesaropapisme* yaitu agama sebagai alat politik penguasa dan agama juga akan menjadi alat penindas.

Natsir melihat pemikiran-pemikiran Soekarno diatas adalah sebagai sebuah distorsi intelektual dan sejarah. Apabila Soekarno sepakat dengan gerakan-gerakan Kemal Attaturk yang memisahkan agama dengan negara. Dalam kerangka berfikir Natsir, negara adalah alat untuk merealisasikan syariat Islam.

²⁴ Waluyo, *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik Di Indonesia*, hlm. 36.

Tanpa adanya kekuatan negara maka pelaksanaan syariat Tuhan hanya akan menjadi ilusi semata. Hal tersebut bukan berarti Islam menerima konsep *caesaropapisme*. Menurut Natsir konsep *caesaropapisme* bukan merupakan ajaran atau sistem politik kenegaraan Islam.²⁵

Natsir juga mengungkapkan salah satu penyebab mengapa orang tidak sependapat dengan negara Islam adalah karena terdapat gambaran yang keliru mengenai negara Islam. Natsir mencoba menjernihkan gambaran Negara Islam sebagaimana yang dipahami Soekarno maupun kalangan yang antipersatuan agama dan negara: gambaran keliru mengenai negara Islam telah muncul semenjak lahirnya karya-karya kaum Orientalis mengenai Islam. Diduga melalui karya-karya inilah menyebabkan menyebarkan gambaran keliru tentang negara Islam. Lahirnya karya-karya ini pada mulanya didorong keinginan untuk mengkritik dan menyerang Islam, ini dilakukan dalam rangka kekalahan Eropa Kristen menghadapi kekuatan militer kaum muslimin dalam perang Salib pada abad 11 sampai 13. Kekalahan tersebut menyebabkan jatuhnya Konstantinopel dan Wina yang merupakan kota penting bagi Kristen telah menimbulkan perasaan marah, malu dan kebencian terhadap kaum muslimin. Lalu para penguasa Kristen di Eropa bersumpah untuk mengusir umat Islam dari kota-kota tersebut. Bentuk penyerangan mereka dalah dengan membuat buku yang berisikan gambaran tidak benar mengenai Islam dan kaum Muslimin: tentang Nabi Muhammad yang digambarkan mempunyai penyakit ayan, gila perempuan, penjahat, pendusta, dll. Oleh karena itu Islam yang dibawa Muhammad bukanlah ajaran yang benar. Agama yang benar, hanya agama Kristen yang dibawa oleh Yesus Kristus.²⁶

Gagasan Demokrasi Terpimpin telah membawa Soekarno ke puncak kekuasaan yang memang telah ia dambakan sejak lama, sebagai orang yang merasakan betapa panasnya sistem Demokrasi Terpimpin, Natsir tentu mempunyai hak sepenuhnya untuk menilai sistem itu. Sejak peristiwa "*patah arang*" antara Soekarno dan Natsir pada awal tahun 1951, lontaran kritik seperti itu wajar adanya, sekalipun berakibat buruk pada partai Masyumi yang harus dibubarkan.

²⁵ M. Natsir, *Capita Selecta*, hlm. 458.

²⁶ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, hlm. 94.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjuangan Natsir di kancah nasional telah dibuktikan dengan peranan yang tidak kecil. Ia bukan semata-mata tokoh keagamaan yang telah menyumbangkan pemikirannya untuk membuka perspektif agama, yaitu upaya agar sikap keberagaman kaum muslimin Indonesia terbuka bagi ide pembaharuan terutama yang berkaitan dengan implementasi ajaran agama dan kehidupan sosial.

Perjuangan politik Natsir sebenarnya telah dimulai ketika kesadarannya tergerak oleh realitas yang dihadapi pada sekitar akhir 1930-an. Natsir menghadapi kenyataan yang bertolak belakang dengan pemahamannya tentang Islam sebagai entitas kehidupan yang telah dipelajarinya.

Apabila ditelusuri terdapat beberapa perjalanan perjuangan Natsir yang senantiasa berbasiskan keislaman, *pertama*, Natsir sebagai seseorang yang pembela agama hal ini seperti ditunjukkan ketika Dr. I. J. Brugmand dalam bukunya *Geschiedenis van her Onderwijs in Netherland Indie*, mengatakan bahwa Islam adalah agama penaklukan yang disebarkan dengan pedang. Natsir menanggapi tesis Brugmand tersebut dengan mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan tidak dengan pedang tetapi dengan kalam (pena). *Kedua*, Natsir berpikir tentang metode yang tepat untuk melaksanakan pendidikan. Ketiga, Natsir tampil sebagai seseorang dengan wawasan yang telah diperolehnya menerjunkan diri sebagai komentator politik. Dalam hal ini polemiknya dengan Soekarno tentang masalah Islam, negara, dan kebangsaan.

Dalam tataran perjuangan yang lebih luas, Natsir terlihat teguh dalam hal demokrasi. Di tangan Natsir, demokrasi mempunyai dimensi dan interpretasi yang luas, seperti musyawarah. Salah satu kunci wawasan politik yang dikembangkan Natsir adalah *syura'* sebagai konsep demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhelmi. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Akh Minhaji. A. *HASSAN Sang Ideologi Reformasi Di Indonesia 1887 – 1958*. Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.
- Deliar Noer. *Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- George McT Kahin. *In Memoriam: Mohammad Natsir 1907-1993*. Indonesia, 1993.
- H. Mas'oeed Abidin. *Gagasan Dan Gerakan Dakwah Natsir*. Yogyakarta: Gree Publishing, 2012.
- khumaidi. "ISLAM DAN TATANEGARA: PEMIKIRAN SOSIAL POLITIK MUHAMMAD NATSIR." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 20, no. No. 1 (Juni 2005): 114.
- M. Natsir. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- . *Capita Selecta*. cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Waluyo. *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Yusril Ihza Mahendra. *M. Natsir dan Sayyid al-Maudūdi: Telaah tentang dinamika Islam dan Transformasi ke dalam Ideologi Sosial dan Politik*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Yusuf Abdullah Puar. *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1978.